

PRIORITAS LAINNYA	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
<b>Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional</b>										
1	Pengembangan kluster industri berbasis pertanian, oleochemical	Fasilitasi Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 provinsi	Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau	20%	40%	60%	80%	100%	30.4	Kemenperin
			Jumlah Perusahaan	40	100	100	100	100		
			Pilot project industri turunan kelapasawit	1	1					
<b>Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional</b>										
1	Peningkatan Peran Diplomasi Ekonomi dalam Forum Multilateral	Terlaksananya partisipasi aktif dalam berbagai siding di forum multilateral	Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam siding internasional terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan	25 posisi	27 posisi	31 posisi	31 posisi	33 posisi	154,2	Kemenlu
			Jumlah koordinasi teknis/ penyelenggaraan pertemuan/ partisipasi dalam siding terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan	114 kali	115 kali	116 kali	117 kali	116 kali		

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral dalam promosi/kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi	Terfasilitasinya promosi/ kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi	% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis ( <i>Trade, Tourism and Investment</i> ) di kawasan Asia Timur dan Pasifik, Sub Sahara Afrika, Eropa Tengah dan Timur	100%	100%	100%	100%	100%	11,9	Kemenlu
3	Perluasan Pasar Non Tradisional	Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama bilateral di kawasan Asia Timur, dan Sub Sahara Afrika	% fasilitasi penyelenggaraan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Sub Sahara Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	9,3	Kemenlu
4	Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar	Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional	40	40	45	50	55	179,9	Kemenda g
			Jumlah posisi runding yang disusun	40	40	45	50	55		
			Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	8	8	8	8	8		
			Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	34	34	34	34	34		
			Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional	6	8	8	8	8		
<b>Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan</b>										
1	Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten	Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga	a. Adanya sistem informasi layanan TKI	Electronic Form; Document	Contact mgmt; Change	Case mgmt; Incident & Problem	Operasional dan pemeliharaan	Operasional dan pemeliharaan	10,0	Kemenkom info

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
			b. Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem	mgmt; Job Order mgmt; Recruitment mgmt; Selection mgmt; Security; Interoperability; Placement mgmt; Campaign mgmt; Operasional  Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah	mgmt; Service Desk mgmt; Payment System mgmt; Performance & Capacity mgmt; Campaign mgmt; Service Order mgmt; Skill & Competency mgmt; Sertifikasi ISO 9001: Sistem mgmt Mutu  Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah	mgmt; Business Continuity; Service Level mgmt; Serifikasi ISO 20000 : IT Service mgmt  Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah, Kantong TKI, POLRI, Menko				-	

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			c. Adanya Infrastruktur SIM TKI	kantong TKI	Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra	Menko Perekonomian, Menko Kesra	Perekonomian, Menko Kesra	Perekonomian, Menko Kesra	8,0	
			d. Adanya Business Process Reengineering	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	Koneksi Internet	Koneksi Internet	3,0	
			e. Adanya regulasi berjalanya SIM TKI	Business Process Reengineering Regulasi Pendukung	Business Process Reengineering Regulasi Pendukung	Business Process Reengineering Regulasi Pendukung	-	-	3,0	
2	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI	a. Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI b. Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI	500 ribu TKI 500 ribu TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	4,6	Kemendagri
3	Pengelolaan Informasi Kependudukan	Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI	a. Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI	Persiapan	1.500 kecamatan	3.000 kecamatan	4.500 kecamatan	6.500 kecamatan	16,8	Kemendagri

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			b. Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI		
4	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian	Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi	a. Pelayanan keimigrasian yang transparan	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%	49,1	Kemenkumham
			b. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%		
			c. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%		
			d. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%		
5	Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri	Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah	% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	130,0	Kemenakertrans

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI	Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	19,4	BNP2TKI
7	Penyiapan pemberangkatan	Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI	a. Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order	100% TKI	100% TKI	100% TKI	100% TKI	100% TKI	110,0	BNP2TKI
			b. Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	174,0	
			c. Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	244,0	
8	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk TKI	Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk TKI yang Diimplementasikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	0,6	Menko Perekonomian
9	Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI	a. Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa)	-	1 hotline services	1 hotline services	1 hotline services	1 hotline services	20,0	BNP2TKI
			b. Jumlah pengaduan yang ditangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	15,0	
			c. Kualitas pelayanan hotline service	-	100% TKI yang diproses	100% TKI yang diproses	100% TKI yang diproses	100% TKI yang diproses	30,0	
			d. Jumlah orang yang berminat	-	100% orang	100% orang	100% orang	100% orang	30,0	

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi  e. Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi		teradvokasi	teradvokasi	teradvokasi	teradvokasi		
				60% TKI bermasalah ditangani	70% TKI bermasalah ditangani	80% TKI bermasalah ditangani	90% TKI bermasalah ditangani	100% bermasalah ditangani	40,0	
10	Pengamanan Keberangkatan	Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural	Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	100%	100%	100%	100%	100%	15,0	BNP2TKI
11	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif	Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	2.000 TKI	3.000 TKI	3.500 TKI	4.000 TKI	4.500 TKI	8,6	BNP2TKI
12	Peningkatan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Terlayannya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat.	Terselenggaranya koordinasi pemulangan TKI/TKI B dari entry point ke daerah asal	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	4,3	Menko kesra
13	Peningkatan Pelayanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Terlayannya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal	Jumlah pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	123,29	Kemensos
14	Peningkatan Ketenteraman, Keterlibatan, dan Perlindungan Masyarakat	Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di lokasi debarkasi dan embarkasi	Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	28,8	Kemenda gri

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
15	Peningkatan Keamanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Tersedianya pengamanan pemulangan TKI bermasalah	Terjaminnya keamanan pemulangan TKI bermasalah/TKIB	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	22,5	POLRI
<b>Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri</b>										
1	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI	Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	1,2	Menko Perekonomian
2	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Tersedianya regulasi yang melindungi TKI	a. Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Ratifikasi konvensi buruh migran	6,0	Kemenakertrans
			b. Amandemen UU 39/2004	Persiapan amandemen UU 39/2004	Persiapan amandemen UU	Persiapan amandemen UU	Amandemen UU	Amandemen UU	5,5	
			c. Persentase peraturan turunan amandemen UU					100% peraturan turunan tersusun	10,9	
			d. Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI	13 atase	13 atase	13 atase	13 atase	13 atase	222,0	
3	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan TKI	a. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	1.120,3	Kemenlu



No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			b. Jumlah Citizen Services yang diperkuat	24 Citizen Services	24 Citizen Services	24 Citizen Services	24 Citizen Services	24 Citizen Services		
			c. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan	-	14.998	8.498	4.998	1.998		
			d. Persentase pemebrian bantuan hukum ( Advokasi dan <i>lawyer</i> ) bagi WNI	-	29,17%	41,20%	60,10%	100%		
			e. Jumlah WNI/TKI yang deportasi	-	9.608	4.804	4.804	4.804		